

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manajemen laba dalam kegiatan operasional perusahaan dikenal sebagai salah satu cara perusahaan untuk dapat memaksimalkan laba. Perusahaan melukan hal ini karena laba merupakan tolok ukur bagi pengambilan keputusan manajerial periode selanjutnya, sebagai dasar perhitungan pembayaran pajak dan pedoman dalam menentukan kebijakan investasi. Fischer dan Rosenzweigh (1995) dalam Arthawan dan Wirasedana (2018: 5) menyatakan bahwa banyak manajer perusahaan beranggapan jika perilaku memajemen laba merupakan sebuah perilaku yang biasa dilakukan dan etis, tidak hanya itu manajemen laba juga dianggap sebagai alat yang sah bagi manajemen untuk melaksanakan tanggungjawab dalam memperoleh keuntungan atau return perusahaan. Tindakan memajemen laba hingga saat ini menjadi perilaku yang legal untuk dilakukan, artinya perilaku memajemen laba tidak menentang standar akuntansi yang berlaku (Merchant dan Rockness dalam Arthawan dan Wirasedana (2018: 5)

Pada dasarnya tindakan manajemen laba dikatakan sebagai kecurangan apabila manajer perusahaan menerima dan melakukan pencatatan laba terlalu cepat, melakukan pencatatan semu, melakukan pencatatan biaya terlalu cepat ataupun lambat, tidak mengungkapkan semua kewajiban, melakukan pencatatan penjualan semu dan melakukan pencatatan persediaan semu (Sulistyanto, 2014: 92). Sedangkan manajemen laba dipandang sebagai tindakan yang positif apabila tindakan tersebut dapat menguntungkan pemegang saham. Selain itu, mampu memberikan informasi rahasia, serta digunakan untuk meminimalkan biaya politik. Biasanya manajemen laba terjadi karena adanya konflik kepentingan antara stakeholders dan manajer yang tidak menemui titik terang, karena kedua belah pihak berusaha untuk mencapai dan mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki. Hal ini disadari oleh manajemen selaku penyusun laporan keuangan perusahaan dan akan mendorong manajer untuk melakukan tindakan manajemen laba. Selain itu, bonus plan hypothesis, debt (equity) hypothesis, dan political cost hypothesisi juga menjadi motivasi bagi manajer dalam melakukan tindakan manajemen laba diperusahaan untuk mencapai kemakmuran hidup

manajer. Tindakan tersebut muncul akibat adanya kesempatan bagi manajer karena manajer memiliki banyak informasi mengenai perusahaan dibandingkan dengan stakeholders, dengan adanya kesempatan tersebut maka manajer dapat melakukan ataupun mewujudkan manajemen laba. (Faradiza, 2017)

Memanajemen laba dengan memanipulasi laporan keuangan bukan hal baru bagi pengusaha. Manipulasi laporan keuangan terjadi akibat adanya asimetri informasi yang tinggi antara manajer dengan stakeholders. Salah satu kasus manajemen laba yaitu yang terjadi pada PT Garuda Indonesia Tbk. Ada laba Rp 70,02 miliar (sekitar \$5 juta) pada 2018. Padahal, setelah dilakukan modifikasi akuntansi, maskapai ini merugi US\$ 175 juta, yaitu sekitar Rp 2,45 triliun dengan kurs saat ini Rp 14.004/US\$. (cnbcindonesia.com, 2020).

Begitu pula di PT. Asuransi Jiwasraya, Situasi Terungkap (Persero). Keuntungan di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) palsu sejak 2006, menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Alasan uang itu dibuat melalui manipulasi laporan keuangan (*window dressing*). Korporasi memperoleh laba Rp 2,4 triliun yang tidak adil pada tahun 2017 karena adanya kecurangan provisi sebesar Rp 7,7 triliun (bisnis.tempo.com, 2020).

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi manajemen laba salah satunya adalah *Sustainability Report* (SR). Pengungkapan *Sustainability report* merupakan publikasi informasi yang mencerminkan kinerja organisasi dalam dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan (The Association of Chartered Certified Accountants, 2013). Menurut Ballou et al. (2006), *sustainability reporting* digunakan oleh perusahaan sebagai cara menjawab permintaan stakeholders terhadap informasi kinerja perusahaan dan manajemen risiko. Laporan keberlanjutan semakin menjadi trend dan kebutuhan bagi perusahaan untuk menginformasikan perihal kinerja ekonomi, sosial dan lingkungannya sekaligus kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) perusahaan (Chariri, 2009).

Menurut Suryawijaya dan Setiawan (1998), Perusahaan tidak dapat sepenuhnya diisolasi dari berbagai efek eksternal, khususnya lingkungan politik dan ekonomi. Gagasan tanggung jawab sosial berkembang dan dimasukkan ke dalam administrasi korporasi seiring dengan meningkatnya kesadaran dan kepekaan para pemangku kepentingan perusahaan.

Bisnis dapat mengatasi kekurangan laporan keuangan konvensional dengan mengungkapkan informasi keberlanjutan dalam laporan tahunan atau laporan tambahan (Martinez et al., 2013). Selain itu perusahaan yang melakukan kegiatan tanggungjawab sosial dianggap sebagai perusahaan yang berperilaku etis atau tidak melakukan pelanggaran seperti manipulasi laba atau biasa disebut manajemen laba. Melaporkan kemajuan organisasi dalam hal keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan berarti terlibat dalam pelaporan keberlanjutan (*The Association of Chartered Certified Accountants*, 2013). Salah satu definisi pelaporan keberlanjutan adalah respons perusahaan terhadap permintaan pemangku kepentingan atas data tentang operasi perusahaan itu dan kemampuannya untuk menghadapi potensi ancaman (Ballou et al, 2006). Pemegang saham, pemerintah, pelanggan, karyawan, dan publik semuanya dianggap sebagai pemangku kepentingan. Investor mencari pengembalian modal mereka, regulator mengharapkan perusahaan untuk bermain dengan peraturan yang telah diberikan, dan masyarakat mengharapkan bisnis untuk merawat tetangganya dan menggunakan metode produksi yang ramah lingkungan (Safitri, 2005).

Perusahaan yang sebelumnya secara eksklusif melaporkan faktor keuangan telah berkembang menjadi mekanisme pelaporan yang lebih kontemporer dengan memasukkan pertimbangan sosial dan lingkungan dalam laporan keberlanjutan mereka. Ini karena perubahan dramatis dalam faktor-faktor yang menentukan nilai perusahaan di pasar. Delapan puluh tiga persen dari kekayaan perusahaan pada tahun 1975 didasarkan pada faktor keuangan, sedangkan tujuh belas persen sisanya didasarkan pada faktor non-keuangan. Pada tahun 2009, hanya 19% dari nilai pasar perusahaan didasarkan pada faktor keuangan, sedangkan 81% sisanya ditentukan oleh faktor non-keuangan (Tomo, 2011). Pencemaran udara, pembuangan limbah cair, penggundulan hutan, strategi pembangunan yang tidak ramah lingkungan, dan bahkan perubahan iklim hanyalah beberapa dari masalah lingkungan yang menyebabkan pergeseran dalam cara menghargai perusahaan. Peristiwa-peristiwa ini menjadi pengingat kepada publik tentang perlunya mengelola sumber daya alam Bumi yang terbatas dengan benar, mendorong peningkatan penekanan pada kebutuhan bisnis untuk

memanfaatkan sumber daya ini secara optimal agar dapat melanjutkan operasinya (Wibowo dan Faradiza, 2014).

Menurut Weber (dikutip dalam Lesmana dan Tarigan, 2014), *Global Reporting Initiative* (GRI) merupakan salah satu organisasi yang memperhatikan keberlanjutan secara serius. Menurut Wibowo dan Faradiza (2014), GRI didirikan karena kebutuhan akan pedoman atau kerangka kerja untuk menyusun sustainability untuk bisnis dari berbagai ukuran dan industri di seluruh dunia mengingat meningkatnya kebutuhan akan transparansi mengenai dampak kegiatan bisnis perusahaan. pada faktor ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Melaporkan kemajuan organisasi dalam hal keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan berarti terlibat dalam pelaporan keberlanjutan (*The Association of Chartered Certified Accountants*, 2013). Salah satu definisi pelaporan keberlanjutan adalah respons perusahaan terhadap permintaan pemangku kepentingan atas data tentang operasi perusahaan itu dan kemampuannya untuk menghadapi potensi ancaman (Ballou et al, 2006). Pemegang saham, pemerintah, pelanggan, karyawan, dan publik semuanya dianggap sebagai pemangku kepentingan. Investor mencari pengembalian modal mereka, regulator mengharapkan perusahaan untuk bermain dengan peraturan yang telah diberikan, dan masyarakat mengharapkan bisnis untuk merawat tetangganya dan menggunakan metode produksi yang ramah lingkungan (Safitri, 2005).

Menurut jajak pendapat 2013 oleh KPMG, semakin banyak bisnis yang memasukkan studi lingkungan, sosial, dan keberlanjutan dengan laporan tahunan mereka. Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia diwajibkan oleh UU no. 40 Tahun 2007 untuk memberikan laporan pertanggungjawaban tahunan kepada pemerintah Indonesia. Aturan serupa juga terdapat dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor X.K.6 yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Ketulusan dan kepedulian pemerintah terhadap tugas sosial dan lingkungan bisnis tercermin dalam aturan ini. Pelaporan laporan keberlanjutan tentang upaya keberlanjutan perusahaan telah ditemukan memiliki hubungan yang menguntungkan dengan laba perusahaan (Weber et al, 2005). Tarigan dan Samuel (2014) memperjelas hal ini ketika mereka berpendapat bahwa mempublikasikan laporan keberlanjutan dapat meningkatkan laba dan arus kas perusahaan.

Nilai sebuah perusahaan diperkirakan meningkat jika perusahaan terlihat akuntabel, bertanggung jawab, dan transparan kepada para pemangku kepentingannya melalui penyebaran informasi tentang operasi dan kinerjanya dalam bentuk laporan keberlanjutan. Karena penurunan asimetri informasi dan kepercayaan yang lebih tinggi pada kemampuan manajemen untuk membuat prediksi yang akurat, investor suka berinvestasi dalam bisnis yang dikomunikasikan secara terbuka (Ernst & Young, 2013). Ada spekulasi bahwa pelaporan transparan tentang keberlanjutan dapat meningkatkan kredibilitas merek di mata pelanggan. Pendapatan perusahaan dapat diharapkan meningkat sebagai akibat dari peningkatan loyalitas konsumen sebagai akibat dari reputasi dan kepercayaan yang tinggi dari perusahaan (Ernst & Young, 2013).

Untuk bisnis yang berpikiran maju, sustainability adalah suatu keharusan untuk berkomunikasi dengan karyawan, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya tentang kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan perusahaan. Dalam upaya menyembunyikan perilaku oportunistik manajer yang terlibat dalam manajemen laba, beberapa perusahaan telah menyalahgunakan berbagai manfaat baik dari pengungkapan pelaporan keberlanjutan untuk membangun citra positif perusahaan. Faktor lainnya yang dapat memengaruhi manajemen laba adalah *Corporate Governance* (CG). Tata kelola perusahaan adalah suatu konsep yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui pemantauan kegiatan manajemen untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, tanggung jawab, independensi, kewajaran, dan kesetaraan perusahaan di mata para pemangku kepentingannya, sebagaimana didefinisikan oleh Komite Nasional Kebijakan Tata Kelola (2006). Menurut (Black et.al 2017), tata kelola perusahaan adalah proses dimana perusahaan dikelola dengan baik sesuai dengan hukum dan kebijakan yang berlaku untuk mencapai keseimbangan yang adil antara kepentingan berbagai konstituen, termasuk investor, regulator, manajer, direktur, karyawan, dan pelanggan. Tata kelola perusahaan juga memastikan bahwa pemegang saham akan menerima pengembalian yang adil atas investasi mereka (Mansor et.al 2013).

Masalah ketidaksejajaran kepentingan antara prinsipal dan agen dapat diselesaikan dalam pengelolaan perusahaan yang baik dengan melembagakan tata

kelola perusahaan (CG) (Midiastuty dan Machfordz, 2003). Dengan menggunakan CG, bisnis dapat mengurangi kemungkinan bahwa pemimpin mereka akan terlibat dalam manipulasi laba (Agustia, 2013). *The Australian of Company Directors* (2013) dalam Zulhelmy et, al (2021: 18) menyatakan bahwa tata kelola perusahaan mengacu pada sistem dan proses yang diterapkan untuk mengendalikan, memantau, atau mengelola suatu organisasi. Di sisi lain, tata kelola perusahaan yang baik sangat penting untuk perilaku yang baik dan keputusan dari mereka yang bertanggungjawab atas tata kelola perusahaan. Andri dan Hanung (2007) dalam Anggraeni & Hadiprajitno (2013: 1) mengatakan terdapat beberapa mekanisme *Corporate Governance* (GCG) yang dapat meminimalisir terjadinya konflik keagenan manajemen laba, salah satunya yaitu melalui komite audit.

Komite audit merupakan salah satu mekanisme dimana kualitas tata kelola perusahaan (CG) dapat dievaluasi. Diperkirakan bahwa peningkatan jumlah komite audit akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas dan mengurangi kebutuhan perusahaan untuk terlibat dalam manajemen laba sehingga tampak lebih sah. Per tahun 2017 (Bangun). Menurut Asosiasi Komite Audit Indonesia (2010), memiliki komite audit akan membantu meningkatkan kualitas pengawasan internal perusahaan dan memaksimalkan *check and balances*, yang pada gilirannya akan memberikan yang terbaik bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. perlindungan. Dewan komisaris bertanggung jawab untuk membentuk komite audit, sebagaimana disyaratkan oleh Undang Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007.

Sebagaimana mestinya Komite Audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris salah satunya melaporkan pengawasan terhadap penyusunan laporan keuangan perusahaan kepada Dewan Komisaris, Komite Audit menjadi salah satu elemen penting bagi perusahaan guna sebagai pengawas dalam menyusun laporan keuangan dan tata kelola perusahaan. Penelitian yang dilakukan (Savira & Krisnando, 2021) mengatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba.

Komite audit akan memberikan dorongan bagi manajemen perusahaan untuk melakukan pengelolaan usaha yang sehat melalui peran pengawasan yang dilakukan. Komite audit merupakan penghubung antara manajemen

perusahaan dengan dewan komisaris, dengan hasil temuan yang dilakukan ketika melakukan peran pengawasan terhadap kegiatan manajemen perusahaan untuk mengembangkan usaha. Adanya fungsi dari komite audit tersebut membuat ada dorongan untuk berusaha memenuhi prinsip-prinsip good corporate governance, yang terdiri dari: fairness, responsibility, accountability, dan transparency. Peran penting komite audit untuk menciptakan Good Corporate Governance, membuat adanya tuntutan untuk mempertahankan independensi komite audit dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan. Komite audit harus independen yaitu tidak dapat dipengaruhi oleh pihak lain dalam menjalankan peran pengawasan. Hal ini dibutuhkan agar temuan dalam tindak pengawasan yang dilakukan oleh komite audit mampu bersifat obyektif dalam arti sesuai dengan kondisi sebenarnya, sehingga terus mendapatkan upaya perbaikan bagi manajemen perusahaan agar selalu mampu menjalankan operasi usaha sesuai dengan tata nilai yang seharusnya berlaku. Komite audit yang independen akan berlaku adil kepada setiap pihak yang berkaitan dengan perusahaan. Karena tidak membawa kepentingan dari pihak manapun tetapi berlaku adil kepada seluruh pihak berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan. Secara kualitatif maupun kuantitatif, pembentukan komite audit dalam perusahaan berperan dalam efektivitas dan efisiensi perusahaan, sehingga membantu perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan praktik-praktik pengelolaan perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) akan menciptakan insentif yang efektif bagi manajemen perusahaan dan penggunaan sumber daya yang efisien, sehingga mendorong terbentuknya kepercayaan investor, dan masuknya arus modal yang mendorong pulihnya perekonomian, baik secara makro maupun mikro. Peran penting komite audit dalam Good Corporate Governance tersebut mendatangkan tuntutan untuk memasukkan komite audit sebagai bagian dari pengembangan usaha.

Beberapa penelitian sebelumnya telah melihat aspek yang berbeda dari manajemen laba dan bagaimana variabel tersebut dipengaruhi oleh pengungkapan

pelaporan berkelanjutan serta komite audit. Berdasarkan hasil dari peneliti sebelumnya diperoleh *Research Gap* sebagai berikut:

Variabel	Nama Peneliti	Hasil penelitian
Pengaruh <i>Sustainability Reporting</i> terhadap Manajemen Laba	Kinasih et al. (2018)	Tidak berpengaruh
	Alain et al. (2019)	Berpengaruh negative
	Wiri Astuti (2021)	Berpengaruh negative
Pengaruh Komite Audit terhadap Manajemen Laba	Savira & Krisnando (2021)	Tidak berpengaruh
	Jihan, dkk (2020)	Berpengaruh Positif
	Marsha dan Ghozali (2017)	Berpengaruh negative

Sumber: Data diperoleh dari jurnal terdahulu

Peneliti menempatkan pengungkapan sustainability reporting dan komite audit sebagai variabel independen serta manajemen laba sebagai variabel dependen, karena adanya indikasi kedua variabel tersebut berperan untuk menutupi tindakan tidak etis perusahaan seperti manajemen laba (Kinasih et al., 2018). Perbedaan penelitian ini dari sebelumnya adalah perusahaan yang sedang dianalisis. Peneleitan ini mengambil keseluruhan sektor perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk menjadi subjek penelitian. Dasar dilakukannya penelitian ini juga dikarenakan masih terdapatnya *research gap* atau perbedaan hasil dari para peneliti sebelumnya. Akibatnya, peneliti mempertimbangkan untuk menggunakan judul penelitian:

“PENGARUN PENGUNGKAPAN SUSTAINABILITY REPORTING DAN KOMITE AUDIT TERHADAP MANAJEMEN LABA”

(Study Empiris Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diutarakan sebelumnya, dengan demikian perumusan masalah yang dirumuskan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Sustainability Reporting* berpengaruh terhadap manajemen laba?
2. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap manajemen laba?

C. Tujuan Penelitian

Adapun dua tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh pengungkapan *Sustainability Reporting* terhadap manajemen laba di Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Menganalisis pengaruh Komite Audit terhadap manajemen laba.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian yang dilakukan, penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat kepada beberapa pihak. Pihak tersebut antara lain:

1. Manfaat teoritis

Dalam penelitian ini, dapat digunakan untuk melengkapi pemahaman kita tentang bagaimana dan Tata Kelola Perusahaan mempengaruhi perdagangan perusahaan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2017 hingga 20221. Diharapkan penelitian ini akan memberikan wawasan baru tentang teori-teori yang ada, melayani sebagai titik referensi, dan memberikan kedalaman pada karya ilmiah yang akan terbukti berguna dalam penyelidikan selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

1. Akademisi

Dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam, dan perspektif tentang, laporan keberlanjutan, tata kelola perusahaan, dan manajemen laba.

Keterbukaan Laporan Keberlanjutan Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia peran Pelaporan Keberlanjutan dan Tata Kelola Perusahaan.

2. Perusahaan

Perusahaan dapat menggunakan temuan penelitian ini untuk lebih memahami masalah internal yang berdampak pada keandalan laporan keberlanjutan mereka.

3. Investor

Tindakan tanggung jawab sosial perusahaan yang diungkapkan melalui laporan keberlanjutan adalah salah satu cara di mana perusahaan dapat berkelanjutan di lingkungan sosialnya, dan pengungkapannya merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan oleh investor.

4. Pemerintah

Temuan studi ini dapat membantu memandu diskusi atau keputusan kebijakan oleh pemerintah Indonesia saat mereka bekerja untuk meningkatkan pelaporan keberlanjutan perusahaan.

5. Masyarakat

Sebagai pengatur tindakan perusahaan, Anda harus memberi tahu publik tentang jalur hukum yang tersedia bagi mereka.

